

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN UANG TERIMA KASIH ATAU  
TABADUL ALMAL DALAM AKAD MURABAHAH DI KOPERASI UBM  
SYARIAH KABUPATEN MAGETAN**  
(Studi Kasus :Koperasi UBM syariah di kabupaten Magetan)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

**ELFA AVIANTO**

**C100130233**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN UANG TERIMA KASIH ATAU  
TABADUL ALMAL DALAM AKAD MURABAHAH DI KOPERASI UBM  
SYARIAH KABUPATEN MAGETAN**

(Studi Kasus :Koperasi UBM syariah di kabupaten Magetan)

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh :

**ELFA AVIANTO**

**C100130233**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

**Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wardah Yuspin', written over a horizontal line.

**(Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN UANG TERIMA KASIH ATAU  
TABADUL ALMAL DALAM AKAD MURABAHAH DI KOPERASI UBM  
SYARIAH KABUPATEN MAGETAN**

(Studi Kasus : Koperasi UBM syariah di kabupaten Magetan)

Yang ditulis oleh :

**ELFA AVIANTO**

C.100.130.233

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 21 Oktober 2017


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

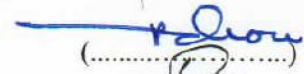
Dewan Penguji,

Ketua : Wardah Yuspin, S.H, M.Kn., Ph.D

Sekretaris : Dr.Kelik Wardiono,SH. MH

Anggota : Septarina Budiwati, SH. MH

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 Oktober 2017

Penulis



ELFA AVIANTO

C100130233

# TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN UANG TERIMA KASIH ATAU TABADUL ALMAL DALAM AKAD MURABAHAH DI KOPERASI UBM SYARIAH KABUPATEN MAGETAN

(Studi Kasus : Koperasi UBM syariah di kabupaten Magetan)

## ABSTRAK

Koperasi syariah memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampir sama kuatnya, yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah, melihat dari prinsip-prinsip yang ada dalam koperasi, maka tidak ada hal yang bertentangan dengan syariah Islam. Oleh karenanya, meski koperasi bukan berasal dari Islam secara murni, tetapi lembaga ini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam transaksi koperasi syariah terdapat salah satu akad murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Payung hukum yang digunakan koperasi syariah yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan fatwa Dewan Syariah Nasional (MUI). Di dalam akad murabahah tersebut terdapat penambahan akad tabadul almal (uang terima kasih), penambahan akad tersebut dalam syariat islam diharamkan, karena akad (perjanjian) yang di sebutkan di awal merupakan riba.

*Kata kunci: Koperasi Syariah, Akad Murabahah, Akad Tabadul Almal*

## ABSTRACT

Islamic cooperation has two background of the establishment and the activities are almost the same strength, namely as micro finance and as a financial institution of sharia. View of the the principles that exist in the cooperative, then there is nothing that contradicts with islamic sharia. Although the cooperative is not derived from islam, but this financial institution is in accordance with the islamic values. In the transactions of islamic cooperatives, there are one of the murabahah contract which is a sale and purchase agreement on certain goods, where the seller mentions selling price consists of the price of staple goods and certain profit levels over the goods and where the selling price is approved by the buyer. The legal use of islamic cooperation namely Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 about cooperatives and the National Sharia council (MUI). In the murabahah contract, there is the addition of contract tadabul almal (the money for thanking), the addition of the contract in islamic law is forbidden because of the contract (agreement) which mentioned in the beginning is the riba.

*Keyword : Islamic Cooperative, Murabahah Contract, Tabadull Almal Contarct*

## 1. PENDAHULUAN

Koperasi syariah tidak memiliki perbedaan sistem yang mencolok dengan koperasi konvensional. Oleh karena itu payung hukum yang digunakan oleh koperasi syariah secara umum menggunakan payung hukum koperasi konvensional yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Belum adanya aturan hukum di bidang koperasi syariah yang mengikat dan melindungi ketentuan yang berhubungan dengan usaha lembaga mikro keuangan syariah, seperti halnya aturan hukum yang berlaku pada koperasi-koperasi konvensional adalah salah satu faktor dominan penyebab timbulnya banyak penyimpangan akad dalam koperasi syariah, termasuk dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip syariah. Hal ini yang dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan. Padahal lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil sesuai dengan syariat Islam, umat islam hendaknya menyadari bahwa islam memiliki khasanah *fiqh mu'amalah* yang sangat kaya dan luas, di antaranya adalah prinsip akad *murabahah*, prinsip tersebut dapat di aplikasikan dalam suatu bentuk lembaga keuangan islam seperti koperasi syariah.<sup>1</sup> Berdasarkan (Pasal 44 UU No. 25 Th.1992). Koperasi sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usaha atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi secara umum.

Salah satu akad yang digunakan dalam koperasi UBM syariah yaitu akad *murabahah*. Akad merupakan salah satu sumber yang terpenting karena adanya suatu akad maka ada kesepakatan hukum yang telah mengikat para pihak yang saling mengadakan akad, sehingga mempunyai kepastian hukum yang mengikat. Seperti yang diungkapkan oleh Syamsul Anwar memberikan pengertian tentang akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>2</sup> Dari pengertian tersebut bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh satu

---

<sup>1</sup>Ilmi Makhalul, 2002 Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, Hal. 1-3

<sup>2</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 68.

pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad. Sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.<sup>3</sup> Murabahah berasal dari bahasa arab dengan akar kata ribh yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.<sup>4</sup>

Tetapi dalam koperasi syariah yang saya teliti terdapat penambahan akad yaitu akad uang terima kasih atau di sebut Tabadul Almal yaitu semacam uang terima kasih dalam akad murabahah, padahal pelaksanaan sistem koperasi syariah harus sesuai dengan syariat islam, begitupun juga dengan akad yang diterapkan di koperasi UBM syariah tidak boleh ada tambahan ataupun pengurangan akad yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI ataupun dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>5</sup> Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut:

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pada penelitian hukum empiris. Maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan pada data primer lapangan.<sup>6</sup> (melakukan wawancara dengan pihak Manager Koperasi UBM Syari’ah)

---

<sup>3</sup>Ibid, Syamsul Anwar, hlm. 69

<sup>4</sup>Lukman Hakim, 2012 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta: Erlangga, hlm.116-117

<sup>5</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal 1

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal 51

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu,<sup>7</sup> maka penulis akan memberikan gambaran secara teliti dan sistematis mengenai sistem akad yang digunakan dalam koperasi UBM Syariah.

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Keterangan atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dilapangan melalui proses wawancara terhadap narasumber yang dianggap mengetahui segala informasi yang diperlukan dalam penelitian.<sup>8</sup> (melalui wawancara langsung dengan manajer UBM Syari'ah)

Data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang berkaitan dengan ini yaitu melalui studi kepustakaan antara lain buku-buku, artikel, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Langkah awal peneliti yaitu melakukan pengumpulan data baik yang dilapangan maupun studi kepustakaan kemudian data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data dan kemudian dilakukan dengan proses pengumpulan data. Apabila data kurang akurat maka peneliti melakukan verifikasi dan kembali mengumpulkan data dilapangan, tujuannya adalah untuk menjamin validitas data yang ada.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan yaitu mengenai proses pelaksanaan pemberian akad tabadul almal (uang terima kasih) di Koperasi UBM Syari'ah Magetan. Serta melihat referensi dari buku fatwa DSN MUI dan peraturan-undangan yang berlaku, kemudian dilakukan pengolahan data. Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data yang valid dan absah, diantaranya adalah:

---

<sup>7</sup> Ahmad Saebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, hal. 57.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal.10



Studi kepustakaan yang di buat dalam penelitian penulisan hukum ini adalah dengan cara mengumpulkan berbagai macam sumber buku, undang-undang, dokumen dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

Yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati objek datanya.<sup>9</sup> Cara perolehan datanya yaitu dengan melihat, mengamati, mewawancarai narasumber dan mempelajari serta menganalisa berbagai data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Akad tabadul almal merupakan perjanjian dimana pemberian sebagian harta yang ikhlas yang di mana dalam pembahasan ini merupakan uang terimakasih dalam akad murabahah. Menurut al-Zuhaily Wahbab Al-mal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat yang diberikan secara ikhlas. Menurut bahasa umum, arti mal ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah, ialah “segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia”.<sup>10</sup>

Uang balas budi (Tabadul Almal) dalam akad murabahah di koperasi UBM syariah yang saya teliti tidak sesuai dengan syariat Islam karena penambahan akad tersebut terdapat larangan oleh syariat islam yaitu termasuk golongan Riba Nasi'ah adalah tambahan yang sudah di tentukan di awal transaksi, yang di ambil oleh sipemberi pinjaman dari orang yang menerima pinjaman sebagai imbalan dari pelunasan bertempo. Riba model ini di haramkan oleh kitab Bullah, sunnah Raul-Nya, dan ijma'umat Islam.<sup>11</sup> Akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua atau ganti salah satunya. Penambahan akad ini termasuk bid'ah yakni kepercayaan penambahan akad yang dibuat-buat atau yang diada-adakan dengan maksud tertentu.

---

<sup>9</sup> Jogiyanto, 2008, Metode Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 89.

<sup>10</sup> Wahbab al-Zuhaily, Al Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), juz 4, hlm.8.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 217

Sedangkan mengenai syarat sahnya suatu akad secara syariah yaitu;

Tidak menyalahi hukum syariah yang di sepakati adanya perjanjian yang di adakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab akad atau perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan kata lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian yang di adakan dengan sendirinya batal demi hukum. Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat merujuk pada ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut “*segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab allah adalah bathil ataupun riba, sekalipun seribu syarat*”

Harus sama ridha dan nadanya pilihan yaitu perjanjian diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, jadi harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak, berarti tidak boleh adanya paksaan dari pihak kesatu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang di adakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak di dasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Harus jelas dan gamblang yaitu sesuatu yang di perjanjikan oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan kesalah fahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. Pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian, pada saat perjanjian atau penerapan perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang di timbulkan oleh perjanjian itu.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Khairuman Pasaribu, S.K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.2

Dalam uraian tersebut secara jelas di sebutkan hal-hal yang di perbolehkan dalam perjanjian, akad tabadul almal meskipun di sepakaati dan ada keridhaan dari pihak nasabah, seharusnya pihak koperasi lebih memikirkan akan tambahan akad tersebut, karena membebani pihak nasabah. Keridhaan akan akad tersebut merupakan paksaan, mau tidak mau nasabah harus menyetujuinya karena nasabah pergi ke koperasi syariah bertujuan mengajukan bantuan, maka nasabah pun dengan keterpaksaan meridhainya.

Beda halnya menurut Bapak Yuli selaku manajer menjelaskan bawasanya penambahan akad tersebut jelas dan tidak ada suatu hal yang merugikan pada pihak nasabah karena sistem akad tersebut menggunakan sistem keterbukaan jadi tidak ada unsur penipuan di perjanjian tersebut yang di sampaikan di awal.<sup>13</sup>

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan terkait pelaksanaan akad murabahah yang di tambahkan akad Tabadul Almal (uang terimakasih) dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 atupun Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam koperasi UBM syariah dan uang balasbudi (TabadulAlmal) dalam akad murabahah apakah sudah sesuai dengan syariat maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

Proses penambahan Akad Tabadul Almal menurut Undang-Undang tidak diatur secara rinci tentang koperasi syariah, sementara penambahan Akad Tabadul Almal menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04 / DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah sekalipun tidak diatur secara rinci. Akan tetapi menurut fatwa DSN tersebut disebutkan segala transaksi harus bebas dari riba, sementara definisi riba adalah penambahan lebih dari pokoknya.

Penambahan Akad Tabadul Almal apabila dilihat dari proses Akad Murabahah tersebut ini merupakan akad yang dikategorikan sebagai akad yang

---

<sup>13</sup>Yuli, manajer koperasi UBM syariah “*wawancara pribadi*” magetan, 15 september 2017, pukul 11.10 WIB

mengandung riba, karena dilihat dari definisi Riba Nasi'ah, Akad Tabadul Almal termasuk Riba Nasi'ah karena Akad Tabadul Almal tersebut di perjanjikan di awal mengenai besaran dari tambahan yang di minta oleh sipemberi kredit tersebut dan sudah diperjanjikan di awal perjanjian tersebut, sehingga adanya Akad Tabadul Almal ini dapat di katakana sebagai riba nasi'ah.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis yang telah di kemukakan diatas, maka penulis akan member masukan yaitu;

Sebaiknya pihak koperasi UBM syariah menghilangkan penambahan akad tersebut, meskipun dalam peraturannya di tak ada larangan tentang penambahan akad tersebut.

Penambahan akad tersebut juga dapat menimbulkan banyak penafsiran dari berbagai pihak, yang dapat menyimpulkan apakah tambahan akad tersebut tergolong dalam riba.

Pihak koperasi harus menghilangkan akad tersebut karena berdampak pada nasabah yang ingin meminjam uang yang secara syariah islam di halalkan. Karena menurut saya penambahan akad tersebut masih tergolong griba.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. 2010. Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers hlm. 68.
- A. Mas'adi, Ghufon . 2002. Fiqih Muamalah Kontektual, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 75
- al-Zuhaily, Wahbab. 2005. Al Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Damaskus: Dar al-Fikr, , juz 4, hlm.8.
- Dimyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik. 2004. Metode Penelitian Hukum. Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal 1
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Celebsn Timur UH III, hlm.103-104
- Firdaus dan Agus Edhi Susanto. 2002. Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek. Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 38-39.

- Hakim, Lukman. 2012. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Yogyakarta: Erlangga, hlm.116-117
- Hasan, M. Ali. 2003. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (FiqhMuamalah), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 161.
- Hulwati. 2009. Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar ModalIndonesia dan Malaysia, Jakarta: Ciputat Press Group, hlm. 76
- Jogiyanto. 2008. Metode Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 89.
- Makhalul, Ilmi. 2002. Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, UU Perss. Patumbak, Hal. 1-3
- Ma'luf , Louis & Al-Munjid fi al-Lughat wa al-‘Alam. 1986. Beirut: Dar al-Masyriq, hlm. 518
- Mertokusumo, Sudikno. 2000. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty, hal.97-98
- M. Syafi'i Anwar.1991. *Alternatif Terhadap Sistem Bunga*, Jurnal Ulumul Qur'an II, Edisi 9 Oktober,hlm. 13
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. fqih muamalat system transaksi dalam Islam, Jakarta: AMZAH, hlm. 215
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010, fqih muamalat system transaksi dalam islam, Jakarta: Amzah, hlm. 215
- Prasetyo, Adib Bimo. 2016. Dalam jurnal Murabahah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Volume 17, Jakarta, Edisi Desember.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. Bank Syari"ah Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, hlm.101
- Soekanto, Soerjono. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, hal 51
- \_\_\_\_\_. 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal.10
- Saebani, Ahmad. 2009. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia, hal. 57.

Suhendi, Hendi dan Muamalah, Fiqh. 2010. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 291.

Sofiani, Triana. 2014. ‘kontruksi norma hukum koperasi syariah dalamkerangka system hukum koperasi syariah’’, dalam Jurnal Hukum Islam Volume 12, Pekalongan, Edisi Desember.

Syafi’i Antonio, Muhammad.2001. *Bank Syari’ah;Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, hlm.101

Sjahdeini, Sutan remy, 2014, PERBANKAN SYARIAH produk-produk dan aspek-aspek hukumnya, Jakarta:kencana Prenamedia Group, hlm.171

Syafi’I Antonio, Muhammad. 1999. Koperasi Syariah Suatu Pengenalan Umum, Cet. I, Jakarta : Tazkia Institute

Sjahdeini, Sutan remy. 2014. Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya, Jakarta:kencana Prenamedia Group, hlm.171

Timorita Yulianti, Rahmani. 2008 Asas-Asas Perjanjian (Akad)dalam Hukum Kontrak Syari’ah, hal 10, Vol. II, No. 1, Juli

Wahbab al-Zuhaily. 2005. Al Fiqh al-Islami wa Adillatuh. (Damaskus: Dar al-Fikr, juz 4, hlm.8.